

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisi Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017)**

Oleh

NORHADI

NIM. 170211040136



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

BANJARMASIN

2019 M/1441 H

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisis Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017)**

TESIS

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh

NORHADI

NIM. 170211040136



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

BANJARMASIN

2019 M/1441 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norhadi
NIM : 170211040136
Tempat/Tgl Lahir : Banjar/02 April 1977
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Analisis Yuridis Putusan MA No.669 K/Ag/2017)**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banjarmasin, 14 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



Norhadi

PERSETUJUAN TESIS

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisis Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017)**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

NORHADI

NIM. 170211040136

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Tanggal, 14 Oktober 2019

Pembimbing II



Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA
Tanggal 14 Oktober 2019

PENGESAHAN TESIS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Analisis Yuridis Putusan MA No. 669 K/Ag/2017)

Oleh :
NORHADI
NIM. 170211040136

Telah diajukan pada Dewan Penguji
Pada Hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019

Dewan Penguji

Nama :		Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.	(Ketua)	1..... 
2. Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	(Anggota)	2..... 
3. Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.	(Anggota)	3..... 
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag.	(Anggota)	4..... 

Mengetahui

Direktur,



Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
Nip. 195886 211980 031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan ilmu dan hikmah-Nya sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau setia hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada para pihak yang telah membantu merampungkan penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir, yang penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
3. Khusus kepada pembimbing penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Syauqi Mubarak Seff, MA. Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan koreksi dan rujukan referensi dalam penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
6. Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalmantan Tengah, para Hakim Tinggi, juga Wakil Ketua dan para Hakim Pengadilan Agama Sampit yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan sharing ilmunya kepada penulis seputar materi tesis ini beserta seluruh pegawai dan staf perpustakaan Pengadilan Agama Sampit yang telah memberikan akses kepada penulis untuk meminjamkan referensi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan HES mahasiswa pasca sarjana UIN Antasari tahun 2017 yang telah memberikan support dan motivasinya sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Ucapan yang tulus juga penulis sampaikan kepada ibu kandung penulis tersayang Bastiah yang telah memberikan doa-doanya yang selalu menyertai penulis baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Tak lupa pula untuk (alm) ayah tercinta yang telah mengajarkan makna kehidupan kepada penulis dengan disertai doa semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai ayah di alam sana. Juga penulis juga menghaturkan cinta kasih kepada isteri tercinta Isna Yuniawati, S.H.I dan keempat anakku, M. Rizki Fadillah, Nadila Itriya Humaira, Nafeeza Zahira dan

Nazeera Zahida. Terimakasih karena selama ini telah menjadi inspirasi dan semangat belajarku.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat buat penulis dan seluruh pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dunia ekonomi syariah dan peradilan di Indonesia.

Banjarmasin, 14 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TITIK SINGGUNG DENGAN KOMPETENSI MENGADILI	
A. Arti Perbuatan Melawan Hukum	33
B. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Islam.....	49
C. Tinjauan Tentang Akad/Perjanjian Syariah.....	51
D. Titik Singgung Kompetensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	54
BAB III. PEMBAHASAN	
A. Sejarah Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	60
B. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.....	65
C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah	73

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERBUTAN MELAWAN HUKUM DALAM
SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO 669 K/Ag/2017

A. Titik Singgung Kewenangan Mengadili Dalam Sebuah Kasus Posisi Putusan Pengadilan Dengan Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah	88
B. Analisa Putusan	122
C. Pendekatan Teori Tujuan Hukum dan Teori Kewenangan.....	134

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran/Rekomendasi	142

DAFTAR PUSTAKA	143
----------------------	-----

BIODATA.....	149
--------------	-----

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong :

1. Fathah panjang : Â / â	4. او : Aw
2. Kasrah Panjang : Î / î	5. اي : Ay
3. Dhammah Panjang : Û / û	

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

misalnya ; رينا ditulis *rabbânâ*

2. Vokal Panjang (*mad*);

Fathah (baris diatas) ditulis â, kasrah (baris dibawah) ditulis î, serta dhammah (baris didepan) ditulis dengan û.

Misalnya ; القارعة ditulis *al-qâri'ah*

المساكن Dituris *al-masâkîn*

المفلحون Dituris *al-muflihûn*

3. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al,

Misalnya : الكافرون ditulis *al-kâfirûn*

Sedangkan kalau diikuti huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya misalnya الرجال ditulis *ar-rîjâl*.

4. Ta' marbûthah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat ditulis h misalnya البقرة ditulis *al-baqarah*

bila ditengah kalimat ditulis t misalnya زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*

ABSTRAK

Norhadi; *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 669 K/Ag/2017)* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al-

Amruzi, M.Hum. (II). Dr. Syaugi Mubarrak Seff, MA., Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Kata Kunci : *Perbuatan Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim dan teori Kewenangan.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang dari putusan Mahkamah Agung RI yang mengadili perbuatan melawan hukum yang menyatakan bahwa segala sengketa yang terjadi berdasarkan prinsip syariah walaupun perkara tersebut mengandung perbuatan melawan hukum dan tidak menutup kemungkinan adanya motif pidana dalam hal ini sengketa antara pengelola dengan pengurus dalam suatu lembaga pembiayaan syariah adalah kewenangan absolut Peradilan Agama walaupun ditingkat pertama dan banding sengketa tersebut bukan menjadi wewenang peradilan agama. dan hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan model penelitian normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan untuk selanjutnya disusun secara sistematis sesuai alur pembahasannya

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewenangan Peradilan Agama khususnya mengenai ekonomi syariah pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bentuk jawaban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya lembaga peradilan yang menangani sengketa yang timbul dari aktivitas ekonomi syariah dengan berdasarkan hukum Islam. Pengaturan ini merupakan bentuk produk hukum responsif karena mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Mengenai sengketa dengan dasar perbuatan melawan hukum dalam ekonomi syariah Pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah bahwa orang dan/atau badan hukum yang menjadi pihak dalam sengketa telah mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang berdasarkan prinsip syariah dan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki kaitan erat atau sebagai akibat adanya hubungan hukum tersebut.

ABSTRACT

Norhadi; Torts In Islamic Economic Disputes (Judicial Decision MA Analysis Study No. 669 K / Ag / 2017) Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (II). Dr. Syaugi Mubarrak Seff, Lc., Thesis, Prodi Law Islamic Economics, Graduate UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

Keywords: Torts, Justice and theoretical considerations Authority.

This study aims to examine the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia regarding acts against the law which states that all disputes that occur are based on sharia principles even though the case contains acts against the law and does not rule out the

possibility of criminal motives in this case a dispute between the manager and the management in a financial institution. sharia is the absolute authority of the Religious Court although it is at the first level and the appeal of the dispute is not the authority of the religious court. and matters considered by judges in determining the authority to adjudicate cases against the law in Islamic economic disputes.

This study uses a model of normative research. The study was conducted by examining the library materials or secondary data. Data were analyzed using qualitative methods. The analysis was conducted by classifying, comparing and linking to further systematically arranged according grooves its discussion.

Based on this research the following conclusions are obtained: (1) The authority of the Religious Courts, especially concerning Islamic economics in Law Number 3 of 2006 concerning First Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts is a form of government response to meet the need for institutions justice that handles disputes arising from Islamic economic activities based on Islamic law. This regulation is a form of responsive legal product because it reflects a sense of justice and meets the expectations of the community. Regarding disputes on the basis of acts against the law in sharia economics Judge's considerations in determining the authority of the Religious Court to adjudicate cases of acts against the law in Islamic economic disputes is that people and / or legal entities that are parties to the dispute have bound themselves in a legal relationship based on the principle sharia and illegal acts have a close relationship or as a result of the existence of the legal relationship.